



RENCANA STRATEGIS

T.A 2024 - 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULSEL



2 0 2 3

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 3 (Tiga) tahun. Kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra telah diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri N omor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada Instruksi tersebut dijelaskan bahwa:

1. Perangkat daerah harus menyusun Renstra 2024-2026 pada Rencana Pembangunan Daerah;
2. Renstra perangkat daerah haruslah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dokumen perencanaan yang pertama kali wajib disusun dan dimiliki oleh perangkat daerah adalah Renstra.

Renstra PD memiliki fungsi sebagai alat ukur dan acuan bagi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan atau tidaknya program kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam indikator kinerja pembangunan yang terdapat di Renstra PD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mensosialisasikan dokumen Renstra PD untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

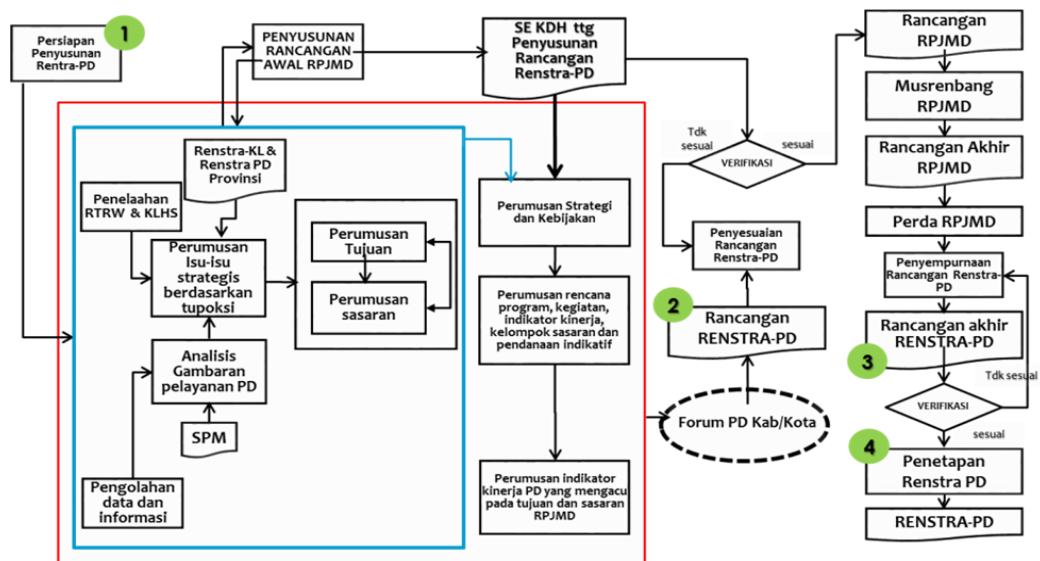
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lain. Oleh karena itu, Renstra PD haruslah memiliki keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini rencana pembangunan Daerah (RPD) sebagai pengganti RPJMD, Renstra K/L. Sehingga, dalam proses penyusunannya Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dokumen-dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas.

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 harus fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Untuk melakukan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan-tahapan ini adalah suatu kesatuan sistematis yang menjamin perumusan Renstra perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan yang berlaku. Beberapa tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

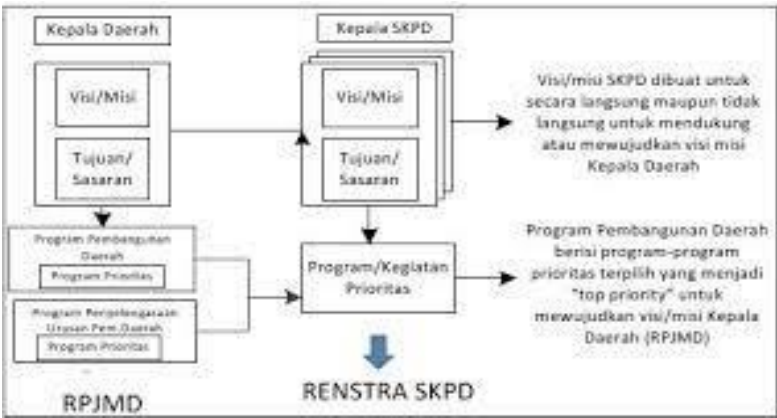
- 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Melaksanakan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) Rumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra



Isi yang terkandung di dalam Renstra Badan Kesbangpol tersebut harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang telah menjadi kebijakan Kepala Daerah (RPD), dan termasuk ke dalam lingkup pekerjaan (tupoksi) Badan Kesbangpol. Fungsi dari Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Renstra harus memperhatikan keterkaitan antara sasaran yang ada di RPD dengan sasaran kinerja dari Perangkat Daerah di dalam mencapai target-target pembangunan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi misslink di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

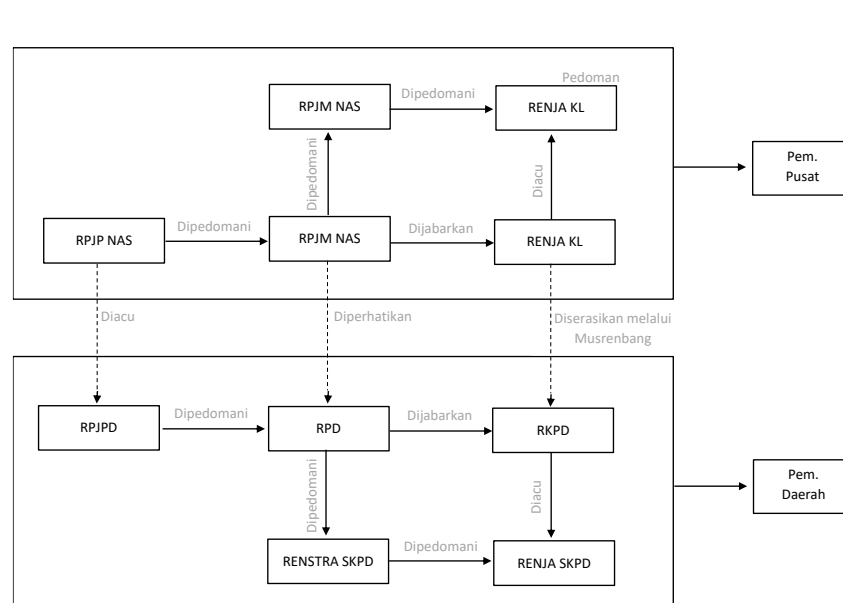
Gambar 1.2 Keterkaitan RPD dan Renstra PD



Selain memiliki keterkaitan dengan RPD, Renstra Badan Kesbangpol juga harus memiliki korelasi dengan Renstra institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan aktor-aktor lingkungan (stakeholder) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Dari sisi instansi yang ada di atas, Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Direktorat Jenderal Politik

Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra KI

KETERKAITAN RENSTRA PD DENGAN RENSTRA KL



- (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
- (3) Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara.
- (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

-
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 - (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 - (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
 - (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
 - (9) Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan.
 - (10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022
 - (11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
 - (13) Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737).
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
 - (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (21) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- (22) Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulsel.
- (23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7).
- (24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik selama Tiga tahunan.
- (2) Tujuan :
 - a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi pencapaian tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026.
 - b. Tersedianya perencanaan yang terarah, terpadu, sinergis dan berkesinambungan terhadap kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - d. Menjadi acuan, jaminan dan keterkaitan dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel periode 2024-2026.

Bab II merupakan Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel.

Bab III merupakan Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat tujuan dan Sasaran.

Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi dan arah kebijakan.

Bab VI merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat program, kegiatan dan pendanaan selama lima tahun.

Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Bab VIII merupakan Bab Penutup

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULSEL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

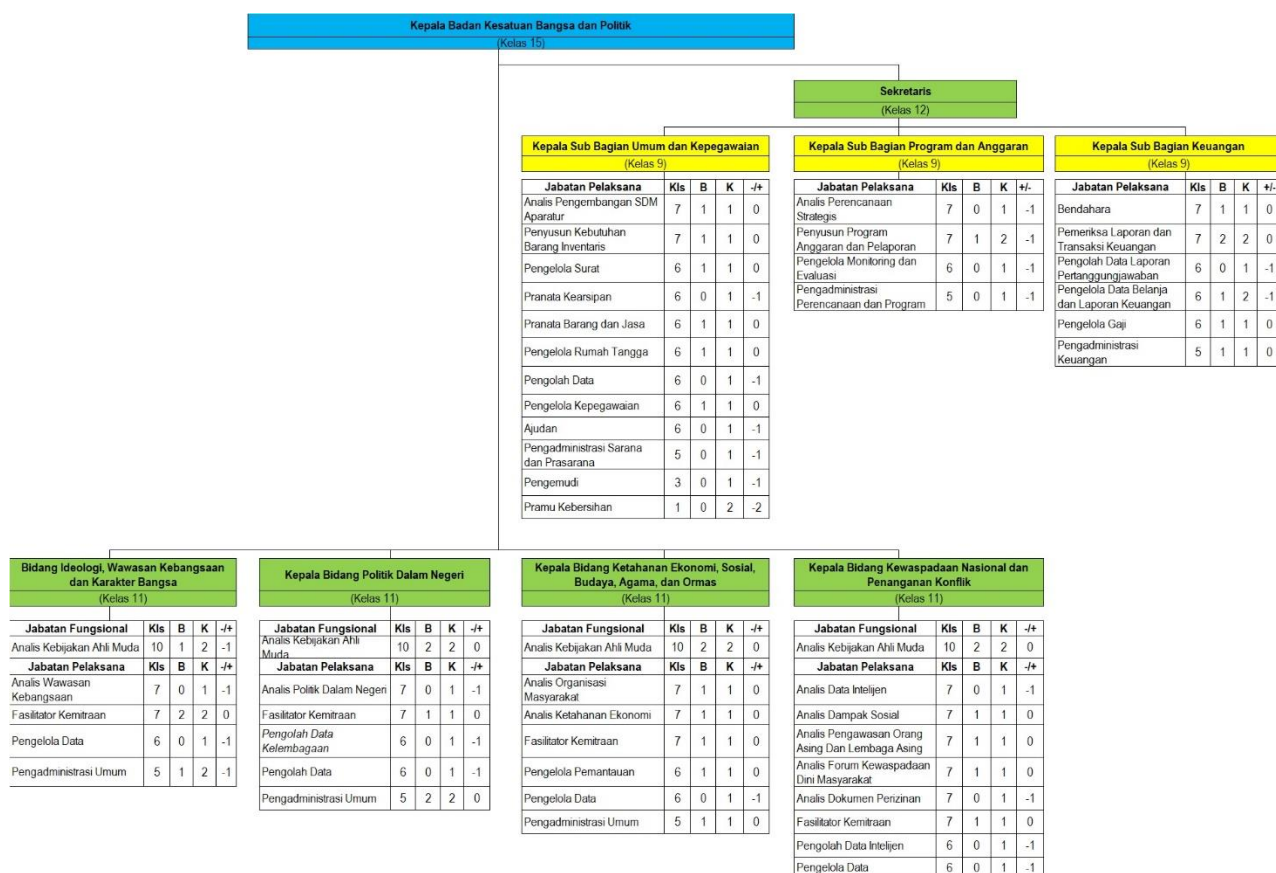
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, di wilayah Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, meliputi:
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Kantor Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat dilihat pada skema berikut ini :



Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan, Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan

bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis penunjang dalam penilaian potensi dan kompetensi bagi Pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan dukungan teknis bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penunjang bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;

-
- k. menyelenggarakan penilaian potensi dan kompetensi pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
 - m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengendalian , dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

-
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

-
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program, anggaran dan kegiatan Badan;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - i. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
 - g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
 - h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pembukuan pengelolaan keuangan;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

-
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - n. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;

-
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
 - o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
 - t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - u. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - v. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - x. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal

-
- ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

-
- g. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - h. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - i. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik, di wilayah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

-
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - g. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya

-
- politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - i. melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

-
- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - f. Pelaksanaan administrasi bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.

kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- g. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- h. Melakukan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama

-
- dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- j. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - l. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

-
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - c. melakukan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan

-
- orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2. Sumberdaya

Untuk menjalankan tugas dan fungsi nya badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi selatan di dukung oleh sejumlah sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Jumlah dan kualitas personil pada Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat		2		5	3	2	6	18
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	1					3	5
3	Bidang Bidang Politik Dalam Negeri				2		2	2	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan		1		1	3	1	2	8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		1		2	1	1	2	7
TOTAL		1	5	0	10	7	6	15	44

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat			16	2	18
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa			3	2	5
3	Bidang Bidang Politik Dalam Negeri		2	1	3	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan		1	6	1	8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			6	1	7
TOTAL			3	32	9	44

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	2	3	11	1	1	18
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1		2	2		5
3	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	2		1	3		6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	1		6	1		8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan			5	2		7

	Konflik						
TOTAL		6	3	25	9	1	44

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Menurut Eselonering

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	
	Jumlah	16

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Menurut Eselonering dan jenis kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV		3	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	2	5	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)			
	Jumlah	4	12	16

Selain masalah kualitas dan kuantitas, masih terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan konsider internal organisasi yang berpotensi menghambat peningkatan pelayanan Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain, masih kurangnya pegawai khususnya pengantar surat (caraka), Sopir, Operator Komputer, Administrasi Umum dan adanya sejumlah pegawai yang memasuki usia pensiun.

Dibalik kelemahan yang ditemukan diatas, terdapat pula beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola organisasi, yakni adanya motivasi yang tinggi dari aparat dan dukungan pimpinan yang konsisten dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat perkembangan kebutuhan ke depan, maka penambahan jumlah tenaga dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan yang sangat mendesak untuk dilakukan melalui program pendidikan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan di dukung sejumlah sarana dan Prasarana meliputi inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.

a. Inventaris / Peralatan Kantor terdiri dari :

– Air Condisioner (AC)	40 Unit
– Alat Pemadam	4 Unit
– Brankas	1 Unit
– Dispenser	9 Unit
– Filling Cabinet	15 Unit
– Hard Disk	10 Unit
– Jam Electronika	1 Unit
– Kipas Angin	1 Unit
– Kursi	275 Unit
– Laptop	21 Unit
– LCD	3 Unit
– Lemari	48 Unit
– Loudspeaker	4 Unit
– Meja	166 Unit
– Mesin Ketik	10 Unit

– Notebook	22 Unit
– Papan Pengumuman	1 Unit
– Printer	48 Unit
– Televisi	11 Unit
– Cermin	3 Unit
– Kompor Listrik	1 Unit
– Komputer PC	23 Unit
– Meja Rapat	13 Unit
– Papan Tulis Elektronik	1 Unit
– Kulkas	3 Unit
– Kursi Tamu	6 Set

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan APBD.

Peralatan kantor rata – rata sudah berumur diatas lima tahun, dan yang rusak perlu diadakan penggantian.

b. Kendaraan Dinas terdiri dari :

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 7 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua dengan rincian sbb:

1) Kendaraan Roda 4 (empat) :

No	Jenis Barang / Merk	Unit	Tahun
1.	Pajero Sport Dakar	1 Unit	2011
2.	Mopen Mini Bus / Toyota Avanza	2 Unit	2014
3.	Mopen Mini Bus / Toyota Avanza	1 Unit	2017
4.	Mopen Mini Bus / Toyota Avanza	1 Unit	2016
5.	Fortuner	1 Unit	2017
6.	Xenia	1 Unit	2004

2) Kendaraan Roda 2 (dua) :

No	Jenis Barang / Merk	Unit	Tahun
1.	Honda	1 Unit	2004
2.	Suzuki	1 Unit	1994

3.	Suzuki	1 Unit	2006
4.	Honda	2 Unit	2011
5.	Yamaha	1 Unit	2011
6.	Suzuki	3 Unit	2011
7.	Yamaha	6 Unit	2017
8.	Yamaha Lexi	2 Unit	2020
9.	Yamaha Mio	2 Unit	2020
10.	Yamaha Nmax	1 Unit	2020

Kendaraan dinas diatas seluruhnya masih dalam keadaan layak jalan akan tetapi sebagian membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi dikarenakan sudah berumur rata – rata diatas delapan tahun .

2.3. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2021. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2021, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

1. Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

• Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada

Tahun ke-3 yaitu tahun 2021. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,29
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik - Nilai Temuan Material LHP (%)	90 95 100 100%

2.3.1 Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.3.1.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110	21	523.8%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk tahun 2020 target pada sasaran ini sebesar 110 Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik akan tetapi sampai dengan akhir 2021 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan sehingga hanya terjadi 21 kasus Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dengan persentase capaian target hanya 523.8 % hasil ini didapat dari target 2021 dibagi realisasi capaian kinerja rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	420	21	2000%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas badan kesatuan bangsa dan politik berhasil meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat terbukti dengan berhasil menekan Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik (sebagai indikator). dimana target akhir rpjmd/ renstra sebesar 420 kasus berhasilkan di tekan untuk tahun ini hanya 21 kasus dengan tingkat pencapaian 2000 % hasil ini didapat dari target akhir RPJMD/RENSTRA dibagi realisasi 2021 rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar nasional	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	21		-

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.3.1.4 Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI, POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.



Ket: kepala badan kesbangpol melakukan Rapat dengan kepala BNN terkait Ranperda P4GN



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima kunjungan Ormas



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat komida dengan stakeholder



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima aspirasi dari mahasiswa



Ket : Rakornas Bakesbangpol di Sulawesi selatan yang dihadiri plt. Gubernur sulsel terkait kolaboratif , kreatif dan inovatif



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Bakesbangpol kab/kota

2.3.1.5 Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan ketentaraman	100 %	82.13%	17.87%

	masyarakat			
--	------------	--	--	--

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82.17% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 17.87%.

2.3.1.6 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 168,493,630	Rp. 88,268,130	52,39	75 %
3.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.73 %
4.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 140,728,600	Rp. 129,899,408	92,30	125%
5.	program pembinaan dan pengembangan	Rp. 1,505,441,400	Rp. 1,427,380,821	94,81	100 %

	ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				
6.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 2,321,545,100	Rp. 2,067,332,883	89,05	100%
	Jumlah	Rp.19,818,131,269	Rp.18,121,425,880	91,44	100

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 6 program penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2021 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2021 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.3.1.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	110	80	21

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, untuk analisis ini pada badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan angka kasus jumlah konflik social yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik yang satuannya kasus dan berhasil menekan sebanyak 21 kasus.

2.3.2 Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

2.3.2.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2021 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.3.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	73,43	73,66	99,68%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 73,43 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 73.66, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 99,68% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektronik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota



Ket : Plt gubernur bersama bakesbangpol prov. Sulsel melakukan pertemuan dengan petinggi Partai politik



Ket : plt gubernur dan bakesbangpol memberikan bantuan hibah kepada partai politik



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan insan PERS dan LSM



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan seluruh Kab/kota terkait kegiatan pemetaan dan monitoring kondisi politik



Ket : kepala badan kesbangpol menghadiri kegiatan partai politik golkar

2.3.2.4. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan.	102,28%	95,70%	6,58 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 95,70 dengan capaian kinerja sebesar 102,28% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 6,58%

2.3.2.5 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.74 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 4 indikator yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 6,686,535,917 atau 95.70 %, dengan tingkat capaian kinerja 99.74 % sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

2.3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	70.58	73,43

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2020 sebesar 70,58 dan realisasi 2021 sebesar 73,43 tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan IDI di Sulawesi Selatan.

2.3.3 Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2.3.3.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP OPD	90	74,05	82.27 %
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP	100 %	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 90 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2019 mendapat poin 74,08 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 82.27%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan untuk

indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%, Indikator ke 4 yaitu temuan material Lhp pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 memperoleh target sebesar 100%.

2.3.3.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	74,05%	74,05%
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100%
Temuan material LHP	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2021 mendapat poin 74,05 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 74,05%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indikator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

2.3.3.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp	Persentase	74,05 100 100 100		

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.3.3.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkcmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.



Ket: kepala badan kesbangpol memberikan arahan terkait pengisian Skp 2021



Ket : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik memberikan arahan dan motivasi kepada eselon 3 dan 4 serta staff



Ket : Kegiatan sosialisasi penilaian kinerja Asn tahun 2021



Ket : Sosialisasi Peningkatan disiplin ASN di masa pandemic covid 19

2.3.3.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	88,81	11,19

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 88,81 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 11,19%.

2.3.3.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keungan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada tabel di atas kita dapat melihat persentase keuangan yang rata-rata tidak mencapai target dikarenakan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tidak mencukupi untuk membayarkan kegiatan tersebut dikarenakan mengalami pengeseran anggaran selama pada masa pandemic covid 19. tapi tingkat capaian kinerja pada tabel diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

2.3.3.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	90	73,38	74,05
2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen (Perencanaan))	Persentase	100%	100%	100%
3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%
4. Temuan Material Lhp		100%		100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata pencapaian diatas 73-100 % dan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 74-100 % sehingga saat ini bakesbangpol sangat tercapai jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakip sebesar 0,67 dan pada indicator ke 4 telah terjadi penambahan indicator oleh Menpan Rb pada saat melakukan Coching Clinic sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi sesuai table di atas, tetapi badan kesatuan bangsa dan politik mendapat cukup baik dalam hal melaksanakan seluruh capaian kinerja pada tahun ini.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19,818,131,269,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18,121,425,880.0 (91.44%), Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	24.196.934.068,00	19.818.131.269,00	(4.378.802.799,00)	(18,10)
Belanja Operasi	23.671.917.268,00	19.502.900.869,0	(4.169.016.399,00)	(17,61)
Belanja Modal	525.016.800,00	315.230.400,00	(209.786.400,00)	(39,96)

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi Rp18,121,425,880,- atau 91,44% dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.818.131.269,00 Dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sebesar 98,15% maka tahun ini terjadi perbaikan dengan meningkatnya realisasi capaian keuangan belanja tidak langsung. Pada dokumen anggaran perubahan, belanja Operasi Berkurang sebesar Rp 4.378.802.799,00 hal ini disebabkan penyesuaian terhadap adanya rasionalisasi anggaran belanja Operasi pada tahun 2021.

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp Rp18,121,425,880,- atau 91.44% dan dari anggaran tersebut memiliki sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp. 1,696,705,389.00. Jika dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan tingkat capaian realisasi keuangan, dengan tingkat capaian tahun 2020 sebesar 87,90%.

Pada table T-C. 23. di bawah menggambarkan pencapaian target berdasarkan jumlah uang dan rata – rata pertumbuhan dana yang di Kelola dan table T-C 24 menggambarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol Prov. Sulsel.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Keping Surat				1817	1817	2100			2125	5821	2705			117%	320%	129%		
	Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi	Jumlah sambungan telepon				6	6	6			6	6	5			100%	100%	83%		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah Dokumen				24	24	24			24	24	24			100%	100%	100%		
	Penyediaan alat/bahan kebersihan serta komponen instansi listrik/penerangan kantor	Tersedianya alat/bahan kebersihan serta komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				5	5	5			5	5	5			100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah barang yang diperbaiki/unit				25	25	45			25	25	25			100%	100%	56%		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya ATK, Cetak dan Penggandaan				5	5	5			5	5	5			100%	100%	100%		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tamu				500	500	150			1280	1503	1503			256%	301%	1002%		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi				125	110	125			131	219	219			105%	199%	175%		

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	kesbangpol yang mendapatkan sosialisasi, bimtek, pelatihan di bidangnya				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
		Cakupan sarana dan prasarana yang tersedia dan layak pakai				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 dan roda 2				2	0	2			2	2	2			100%	0%	100%		
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan				19	19	19			19	19	19			100%	100%	100%		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan				16	92	69			16	92	92			100%	100%	133%		
	Penyediaan Sarana Pameran Pembangunan	Jumlah Paket				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	jumlah stel/pasang				351	307	373			306	307	307			87%	100%	82%		
	Rakornis Sistem Pelaporan bidang Kesatuan Bangsa	Jumlah Peserta				75	75	125			62	44	44			83%	59%	35%		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparat				0	0	0			1	0	0			0%	0%			
	Keikutsertaan Aparat dalam Sosialisasi	Jumlah keikutsertaan aparat dalam sosialisasi/bimtek				75	50	60			71	49	49			95%	98%	82%		
	Safari bersama FKUB, FPK, FKDM dan KOMINDA	Jumlah Wilayah				2	4	2			2	4	4			100%	100%	200%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan bidang Kesbangpol	jumlah peserta				75	75	215			57	21	39			76%	28%	18%		

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang				0	0	5			0	5	5			0%	0%	100%		
	Gugus Tugas Sulsel Melayani, Bersih dan Tertib	Jumlah Laporan				0	0	0			5	0	0			0%	0%	0%		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	cakupan dokumen perencana, evaluasi yang memenuhi standar				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Forum SKPD	Jumlah Peserta				75	75	0			69	64	0			92%	85%	0%		
	Penyusunan laporan tindak lanjut dan bahan pemutahiran LHP	Jumlah Peserta				5	5	0			5	5	0			100%	100%	0%		
	Penyusun bahan / materi/makalah/sa mbutan gubernur /wagub/kaban kesbangpol	Jumlah Sambutan				6	6	0			6	6	0			100%	100%	0%		
	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Dokumen				2	2	0			2	2	0			100%	100%	0%		
	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah Dokumen				1	1	0			1	1	0			100%	100%	0%		
		Jumlah Dokumen				4	6	0			6	6	0			150%	100%	0%		

	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen				2	2	0			2	2	0			100%	100%	0%		
	Penyusunan dan Pengumpulan Bahan LKPJ, LPPD dan SOP lanjutan	Jumlah Dokumen				3	2	0			3	3	0			100%	150%	0%		
	Pelaksanaan unit reformasi birokrasi (Tim assesor)	Jumlah Dokumen				1	0	0			1	0	0			100%	0%	0%		
	Penguatan Focal Point Pengarustamaan Gender (PUG) Bakesbangpol	Jumlah Dokumen				5	1	0			5	1	0			100%	100%	0%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja skpd	Jumlah Peserta				0	0	40			0	2	40			0%	0%	100%		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Peserta				12	12	40			0	0				0%	0%	0%		
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatna kemampuan aparat kesbangpol dan instansi terkait dalam penanganan keamanan dan trantibmas				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
		Cakupan rekomendasi kebijakan pimpinan daerah				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		

Fasilitasi penguatan jaringan intelijen daerah (Kominda)	Jumlah Laporan				8	-	0			8	-				100%	-	0%		
FGD Deteksi Dini Situasi Wilayah se-Sulsel	Jumlah Peserta				225	75	105			112	75	61			50%	100%	58%		
Bintek Pencegahan dan Resolusi Konflik	Jumlah Peserta				75	275	75			55	150				73%	55%	0%		
Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen				24	32	32			32	36	28			133%	113%	88%		
Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Jumlah Kabupaten/Kota				24	24	24			24	24	24			100%	100%	100%		
Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen	Jumlah Peserta				75	275	125			56	97	50			75%	35%	40%		
Workshoop Pencegahan Radikalisme Terorisme	Jumlah Peserta				-	-				-	-	143			-	-	0%		
Antisipasi Potensi dan Penyelesaian Konflik	Jumlah Peserta / Laporan				225	275				170	124	205			76%	45%	0%		
Pusat Pengendalian Krisis	Jumlah Laporan				-	-				-	-	12			-	-	0%		
Rakor Kesbangpol Tk Prov dan Kab/Kota	Jumlah Peserta				100	100				78	32	37			78%	32%	0%		
Satgas Kontra Terorisme, Kontra Radikalisme dan Kontra Narkoba	Jumlah Laporan				-	-				-	-				-	-	0%		
Forum Komunikasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	Jumlah Laporan				-	-				-	-				-	-	0%		
Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	Jumlah Laporan				-	-				-	-				-	-	0%		
Rakor Implementasi Inpres No 1 Tahun 2014	Jumlah Laporan				5	5				5	5				100%	100%	0%		

	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan deteksi dini pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tidak kriminal				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
		menurunya demo yang anarkis				5	5	5			5	5	5			100%	100%	100%		
	Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	Jumlah Peserta / Laporan				75	75	75			60	26	61			80%	35%	81%		
	Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan				6	6	6			6	6	6			100%	100%	100%		
	Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa	Jumlah Peserta / Laporan				50	50	200			45	45	145			90%	90%	73%		
	Fasilitasi Kerjasama Pemeliharaan Ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah MoU				1	1	0			-	1				-	100%	0%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman dan implementasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat sulsel				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Kemah Persaudaraan bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta				125	125	110			114	100				91%	80%	0%		
	Anjangsana dan Dialog Publik Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta				100	200	100			100	200	77			100%	100%	77%		
	Safari Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Jambore Kebangsaan se Sulsel	Jumlah Peserta				400	400	200			400	400	200			100%	100%	100%		

	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
	Pokja Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan				6	6	6			6	4	4			100%	67%	67%		
	PROGRAM FASILITASI KETAHANAN EKONOMI DAERAH	Cakupan informasi terkait ketahanan ekonomi dalam pemeliharaan iklim yang kondusif				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah	Jumlah Laporan				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
	Koordinasi Program Ketahanan Ekonomi Daerah bagi Aparat Instansi Terkait	Jumlah Peserta				75	100	125			54	52	39			72%	52%	31%		
	Bintek Ketahanan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah	Jumlah peserta				75	100	125			50	54	73			67%	54%	58%		
	FGD Penguatan peran Pemda dalam Stabilitas ketersediaan Sembako di Kab/Kota	Jumlah peserta																0%		
	FGD Penanganan Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta																0%		
	Dialog Publik Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait dengan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi	Jumlah Peserta				-	100	125			-	100	102			-	100%	82%		

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman kewaspadaan dini kepada masyarakat				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
		Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewaspadaan dini				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan penguatan Jaringan Binkesbang	Jumlah Peserta				200	100	250			129	29	107			65%	29%	43%		
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov.Sulsel	Jumlah Laporan				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
	Forum Dialog peningkatanAktualisa si Nilai-Nilai Kewaspadaan Nasional	Jumlah Peserta				100	-	125			21	-	68			21%	-	54%		
	Penyuluhan Kewaspadaan Dini terhadap Patologi dan Kriminalitas Sosial	Jumlah Peserta				-	-	125			-	-	33			-	-	26%		
	Workshoop Pembinaan dan Pencegahan Gangguan Kamtibmas	Jumlah Peserta				225	75	125			170	21	70			76%	28%	56%		
	Penyuluhan Kewaspadaan Dini Bagi Tokoh Masyarakat dan pengurus ormas / LSM	Jumlah Peserta				100	-	0			76	-				76%	-	0%		
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia				66	66,5	67			3,1257	2,79	68,35			114%	102%	102%		

	Dialog Publik Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta				75	75	125			60	60	85			80%	80%	68%		
	Forum Dialog Politik Pemuda	Jumlah Peserta				225	500	125			186	500	95			83%	100%	76%		
	Rapat Koordinasi Polkam	Jumlah peserta				200	400	200			200	200	200			100%	50%	100%		
	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Nilai/Indeks Demokrasi Indonesia				66	2,7535	66,5			65	-				98%	-	0%		
	Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM	Jumlah SKT				120	120	120			58	59	45			48%	49%	38%		
	Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol	Jumlah Kerjasama				107	92	0			105	91				98%	99%	0%		
	Bimtek Pelaporan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Parpol	Jumlah Peserta				75	75	0			56	75				75%	100%	0%		
	Workshop Database Ormas/LSM	Jumlah Peserta				-	-	0			-	-				-	-	0%		
	Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta				-	-	0			-	-				-	-	0%		
	PROGRAM KEMITRAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM MENDUKUNG KERUKUNAN NASIONAL	Jumlah Kelompok kerja yang membantu dalam memberikan pemahaman pentingnya pemeliharaan kerukunan				3	3	3			3	3	3			100%	100%	100%		
		menurunya konflik SARA di Sulawesi Selatan				3	5	5			5	5	5			167%	100%	100%		

	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat/Dokumen				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Laporan				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat Multi Etnis	Jumlah Dokumen/laporan				4	4	4			4	4	4			100%	100%	100%		
	Dialog publik penguatan komitmen dan harmonisasi dalam kehidupan umat beragama	Jumlah peserta						125					123					98%		
	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang bela negara				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta				225	100	200			220	100	200			98%	100%	100%		
	Anjangsana dan Dialog Publik Bela Negara	Jumlah peserta				-	-	125			-	-	100			-	-	80%		
	FGD Pemantapan Bela Negara bagi Organisasi Pemuda dan LSM	Jumlah peserta				-	-	50			-	-	50			-	-	100%		
	Forum Komunikasi Bela Negara	Jumlah Laporan				-	-	0			-	-				-	-	0%		
	bitek bela negara bagi aparat se sulsel	Jumlah Laporan				150	125	0			98	116				65%	93%	0%		
	Rakornis FKDM Lembaga Kemasyarakatan dan Pejabat Pemerintah Prov dan Kab/kota se Sulsel	Jumlah peserta				75	75	0			48	35				64%	47%	0%		

	PROGRAM PENGUATAN 4 PILAR KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan				20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
	Dialog Publik Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah Peserta				75	100	200			75	67	200			100%	67%	100%		
	PROGRAM PELAKSANAAN PEMILU	Cakupan pelaksanaan pemilu yang aman dan lancar				2	11				2	11	0			100%	100%	0%		
	Forum Koordinasi Antara Pemprov dan Instansi	Jumlah Pemilu/Pemilukada				2	11				2	11				100%	100%	0%		
	Koordinasi Pengamanan Pelaksanaan Pemilukada	Jumlah Pemilukada yang membutuhkan pengamanan				-	-				-	-				-	-	0%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Prangkat Daerah							100	100					100	100			100%	100%
		% ASN Prangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik							100	100					100	100			100%	100%
		% Penurunan temuan berdasarkan LHP (%)							100	100					100	100			100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu							20	20					20	20			100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan							2	2					2	2			100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD							1	1					1	1			100%	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1	1				1	1				100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-							1	1				1	1				100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1	1				1	1				100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							21	21				21	21				100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1	1				1	1				100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat							20	20				20	20				100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN							14	14				14	14				100%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan penyediaan Administrasi Pelaksanaan							12	12				12	0				100%	0%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12	12				12	12				100%	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD							12	12				12	12				100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen/laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD							1	1				1	1				100%	100%

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							1	1				1	1				100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD							12	12				12	12				100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis							1	1				1	1				100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik							20	20				20	20				100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							1	1				1	1				100%	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							1	1				1	1				100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik							2	2				2	0				100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja							20	20				20	20				100%	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan dan Prasarana Disiplin Pegawai							1	1				1	0				100%	0%

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Baju						58	58				0	58				0%	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						12	12				12	12				100%	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi						1	1				1	0				100%	0%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12	12				12	12				100%	100%
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Dokumen Pemulangan Pegawai yang						1	1				1	0				100%	0%
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam						1	1				1	0				100%	0%
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pemindahan						1	1				1	0				100%	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1	1				1	1				100%	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi Perpu						100	100				100	0				100%	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Perpu						10	10				10	0				100%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor						20	20				20	20				100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						1	1				1	1				100%	100%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan						3	3				3	0				100%	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga						10	10				10	0				100%	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor						10	10				10	0				100%	0%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang						2	2				2	2				100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan						4	4				4	0				100%	0%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material						10	10				10	10				100%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitasi						1	1				1	1				100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas						32	32				32	100				100%	313%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip dinamis yang di tata						100	100				100					100%	0%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem						12	12				12	12				100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20	20				20	20				100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas						1	1				1	0				100%	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel						5	5				5	0				100%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya						29	29				29	29				100%	100%

	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem						1	1				1	0				100%	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit						5	5				5	0				100%	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit						5	5				5	0				100%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20	20				20	20				100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat						150	150				150	0				100%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Telepon						3	3				3	3				100%	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20	20				20	0				100%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	12				12	12				100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam						20	20				20	15				100%	75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan						6	6				6	6				100%	100%
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas						17	17				17	17				100%	100%
	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan Mebel						20	20				20	0				100%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jumlah pemeliharaan						10	10				10	10				100%	100%

	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan							1	1				1	0				100%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya							1	1				1	1				100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan							20	20				20	20				100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	% Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat							20	20				20	19				100%	95%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah							2	2				2	2				100%	100%
		Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing							4	4				4	4				100%	100%
		Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra							4	4				4	4				100%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas							4	4				4	4				100%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa							12	12				12	12				100%	100%
		Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan							4	4				4	4				100%	100%
		Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan							4	4				4	4				100%	100%
		Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah							100	100				100	100				100%	100%
		Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa							12	12				12	12				100%	100%
		Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi							12	12				12	12				100%	100%

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah							1	1				1	1				100%	100%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							12	12				12	12				100%	100%

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							12	12					12	12				100%	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							16	16					16	16				100%	100%

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						93	93				93	93				100%	100%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi						12	12				12	12				100%	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	% Keikutsertaan masyarakat dalam bela negara						20	20				20	20				100%	100%
																		0%	0%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara						500	500				500	500				100%	100%
		jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter,						4	4				4	4				100%	100%
		jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)						4	4				4	4				100%	100%
		jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan						4	4				4	4				100%	100%

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran							6	6				6	6				100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,							1	1				1	1				100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan kebijakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran							1	1				1	1				100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran							3	3				3	3				100%	100%

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran							1	1					1	1				100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba							20	20					20	20				100%	100%
		% Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang							100	100					100	100				100%	100%
		jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis							4	4					4	4				100%	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha							100	100					100	100				100%	100%
		Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah							4	4					4	4				100%	100%
		Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama							4	4					4	4				100%	100%
		Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan							4	4					4	4				100%	100%

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat							1	1				1	0				100%	0%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat							4	4				4	4				100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat							3	3				3	3				100%	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat							1	1					1	1				100%	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat							3	3					3	3				100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	% Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 Konsensus Kebangsaan							20	20					20	20				100%	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang Dikelola							5	6					5	5				100%	83%

	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							1	1					1	0				100%	0%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi			-				1	1					1	1				100%	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							1	1					1	1				100%	100%

	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						1	1				1	0				100%	0%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan						1	1				1	1				100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	% Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu						81,89	82,01				81,89	91,17				100%	111%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi							2	2				2	2				100%	100%
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat							100	100				100	250				100%	250%
	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol							1	1				1	1				100%	100%
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia							0	0				0	1				0%	#DIV/0!
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,							1	1				1	1				100%	100%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan							3	3				3	3				100%	100%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,							13	13				13	13				100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan							6	6				6	6				100%	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,							2	2				2	2				100%	100%

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol Prov. Sulsel

NO	URAIAN	Target Renstra SKPD tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.283.539.210					2.278.938.762					99,8%					2.283.539.210	2.278.938.762
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000					50.000.000					100,0%					50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi	20.282.100					15.782.992					77,8%					20.282.100	15.782.992
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	27.440.000					27.440.000					100,0%					27.440.000	27.440.000
	Penyediaan alat/bahan kebersihan serta komponen instansi listrik/penerangan kantor	361.961.970					361.961.970					100,0%					361.961.970	361.961.970
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	117.700.000					117.700.000					100,0%					117.700.000	117.700.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak	472.100.000					472.085.000					100,0%					472.100.000	472.085.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	564.055.140					564.055.000					100,0%					564.055.140	564.055.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	670.000.000					669.913.800					100,0%					670.000.000	669.913.800
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	938.545.990					936.078.800					99,7%					938.545.990	936.078.800
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-					-					0,0%					-	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	586.095.990					584.843.200					99,8%					586.095.990	584.843.200
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	68.500.000					68.436.500					99,9%					68.500.000	68.436.500
	Penyediaan Sarana Pameran Pembangunan	-					-					0,0%					-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	78.000.000					77.567.600					99,4%					78.000.000	77.567.600
	Rakornis Sistem Pelaporan bidang Kesatuan Bangsa	-					-					0,0%					-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-					-					0,0%					-	-
	Keikutsertaan Aparat dalam Sosialisasi	65.000.000					65.000.000					100,0%					65.000.000	65.000.000
	Safari bersama FKUB, FPK, FKDM dan KOMINDA	-					-					0,0%					-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan bidang Kesbangpol	100.950.000					100.340.000					99,4%					100.950.000	100.340.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	40.000.000					39.891.500					99,7%					40.000.000	39.891.500
	Gugus Tugas Sulsel Melayani, Bersih dan Tertib	-					-					0,0%					-	-
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	155.250.000					154.603.900					99,6%					155.250.000	154.603.900
	Forum SKPD	93.150.000					93.150.000					100,0%					93.150.000	93.150.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.100.000					61.453.900					99,0%					62.100.000	61.453.900
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-					-					0,0%					-	-

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3.704.015.400					3.701.896.600						99,9%					3.704.015.400	3.701.896.600
FGD Deteksi Dini Situasi Wilayah se-Sulsel	-					-						0,0%					-	-
Bintek Pencegahan dan Resolusi Konflik	-					-						0,0%					-	-
Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah	1.234.979.300					1.234.928.900						100,0%					1.234.979.300	1.234.928.900
Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	99.400.000					99.293.400						99,9%					99.400.000	99.293.400
Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen	171.550.000					171.010.000						99,7%					171.550.000	171.010.000
Workshoop Pencegahan Radikalisme Terorisme	215.550.000					215.010.000						99,7%					215.550.000	215.010.000
Kegiatan Rakor Kesbangpol Bersama Unsur Terkait Tingkat Provinsi/Kab/Kota	-					-						0,0%					-	-
Antisipasi Potensi dan Penyelesaian Konflik	154.796.100					154.796.100						100,0%					154.796.100	154.796.100
Pusat Pengendalian Krisis	66.900.000					66.900.000						100,0%					66.900.000	66.900.000
Rakor Kesbangpol Tk Prov dan Kab/Kota	116.050.000					115.230.000						99,3%					116.050.000	115.230.000
Satgas Kontra Terorisme, Kontra Radikalisme dan Kontra Narkoba	-					-						0,0%					-	-
Forum Komunikasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	-					-						0,0%					-	-
Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	1.644.790.000					1.644.728.200						100,0%					1.644.790.000	1.644.728.200
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-					-						0,0%					-	-
Pokja Pendidikan Wawasan Kebangsaan	-					-						0,0%					-	-
PROGRAM FASILITASI KETAHANAN EKONOMI DAERAH	61.000.000					60.961.200						99,9%					61.000.000	60.961.200
Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah	61.000.000					60.961.200						99,9%					61.000.000	60.961.200
Koordinasi Program Ketahanan Ekonomi Daerah bagi Aparat Instansi Terkait	-					-						0,0%					-	-
Bintek Ketahanan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah	-					-						0,0%					-	-
FGD Penguatan peran Pemda dalam Stabilitas ketersediaan Sembako di Kab/Kota	-					-						0,0%					-	-
FGD Penanganan Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-					-						0,0%					-	-
Dialog Publik Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait dengan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi	-					-						0,0%					-	-
PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	892.100.000					891.579.500						99,9%					892.100.000	891.579.500
Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	51.000.000					50.855.000						99,7%					51.000.000	50.855.000
Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM	813.500.000					813.125.000						100,0%					813.500.000	813.125.000
Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa	27.600.000					27.599.500						100,0%					27.600.000	27.599.500

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-					-					0,0%					-	-
Kemah Persaudaraan bagi Generasi Muda	-					-					0,0%					-	-
Anjagsana dan Dialog Publik Wawasan Kebangsaan	-					-					0,0%					-	-
Safari Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda	-					-					0,0%					-	-
Jambore Kebangsaan se Sulsel	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	235.250.000					234.790.000					99,8%					235.250.000	234.790.000
Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan penguatan Jaringan Binkesbang	-					-					0,0%					-	-
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov.Sulsel	-					-					0,0%					-	-
Forum Dialog peningkatanAktualisasi Nilai-Nilai Kewaspadaan Nasional	-					-					0,0%					-	-
Penyuluhan Kewaspadaan Dini terhadap Patologi dan Kriminalitas Sosial	235.250.000					234.790.000					99,8%					235.250.000	234.790.000
Workshoop Pembinaan dan Pencegahan Gangguan Kamtibmas	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	76.500.000					76.500.000					100,0%					76.500.000	76.500.000
Dialog Publik Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik Masyarakat	-					-					0,0%					-	-
Forum Dialog Politik Pemuda	-					-					0,0%					-	-
Rapat Koordinasi Polkam	-					-					0,0%					-	-
Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76.500.000					76.500.000					100,0%					76.500.000	76.500.000
Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM	-					-					0,0%					-	-
Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol	-					-					0,0%					-	-
Bimtek Pelaporan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Parpol	-					-					0,0%					-	-
Workshop Database Ormas/LSM	-					-					0,0%					-	-
Pendidikan Politik Masyarakat	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM KEMITRAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM Mendukung Kerukunan Nasional	131.497.700					131.495.700					100,0%					131.497.700	131.495.700
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	86.550.000					86.550.000					100,0%					86.550.000	86.550.000
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	44.947.700					44.945.700					100,0%					44.947.700	44.945.700
Penguatan Komitmen dan Harmonisasi dalam Kehidupan Umat Beragama	-					-					0,0%					-	-
Pemberdayaan Masyarakat Multi Etnis	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	-					-					0,0%					-	-
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-					-					0,0%					-	-
Anjagsana dan Dialog Publik Bela Negara	-					-					0,0%					-	-

FGD Pementapan Bela Negara bagi Organisasi Pemuda dan LSM	-					-					0,0%					-	-
Forum Komunikasi Bela Negara	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM PENGUATAN 4 PILAR KEBANGSAAN	-					-					0,0%					-	-
Dialog Publik Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	-					-					0,0%					-	-
PROGRAM PELAKSANAAN PEMILU	107.102.200					107.102.200					100,0%					107.102.200	107.102.200
Forum Koordinasi Antara Pemprov dan Instansi	107.102.200					107.102.200					100,0%					107.102.200	107.102.200
Koordinasi Pengamanan Pelaksanaan Pemilu	-					-										-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		936.340.000	518.466.500				907.666.800	447.729.300				96,9%	86,4%			- 417.873.500	- 459.937.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama		55.000.000	22.933.000				53.720.000	22.892.500				97,7%	99,8%			- 32.067.000	- 30.827.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas		647.340.000	300.820.000				623.889.000	300.681.800				96,4%	100,0%			- 346.520.000	- 323.207.200
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor		65.000.000	89.713.500				61.057.800	21.000.000				93,9%	23,4%			24.713.500	- 40.057.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor		169.000.000	105.000.000				169.000.000	103.155.000				100,0%	98,2%			- 64.000.000	- 65.845.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		6.896.142.027	1.932.205.854				6.667.250.785	1.501.820.023				96,7%	77,7%			- 4.963.936.173	- 5.165.430.762
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.111.819	18.115.854				13.216.765	11.210.517				73,0%	61,9%			4.035	- 2.006.248
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		12.500.000	12.500.000				10.644.920	10.806.360				85,2%	86,5%			-	161.440
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		447.334.836	484.192.800				442.400.000	484.192.800				98,9%	100,0%			36.857.964	41.792.800
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		885.130.000	329.172.700				884.830.000	309.148.741				100,0%	93,9%			- 555.957.300	- 575.681.259
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		23.918.000	16.601.750				23.918.000	16.510.500				100,0%	99,5%			- 7.316.250	- 7.407.500
Penyediaan Makanan dan Minuman		4.813.147.372	584.922.000				4.598.722.300	311.587.895				95,5%	53,3%			- 4.228.225.372	- 4.287.134.405
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran		80.000.000					79.560.000					99,5%	0,0%			- 80.000.000	- 79.560.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		616.000.000	486.700.750				613.958.800	358.362.940				99,7%	73,6%			- 129.299.250	- 255.595.860
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA		64.750.000	95.620.000				64.750.000	65.050.600				100,0%	68,0%			30.870.000	300.600
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		2.750.000					2.750.000					100,0%	0,0%			- 2.750.000	- 2.750.000
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		50.000.000	87.170.000				50.000.000	59.960.600				100,0%	68,8%			37.170.000	9.960.600

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan		6.000.000	8.450.000				6.000.000	5.090.000				100,0%	60,2%			2.450.000	-	910.000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		3.000.000					3.000.000	-				100,0%	0,0%			-	3.000.000	-	3.000.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		3.000.000					3.000.000	-				100,0%	0,0%			-	3.000.000	-	3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		15.310.000	51.425.000					-				0,0%	0,0%			36.115.000		-	
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			51.425.000					-				0,0%	0,0%			51.425.000		-	
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu								-				0,0%	0,0%			-		-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		15.310.000						-				0,0%	0,0%			-	15.310.000		-
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMILU		79.250.000	180.174.400				76.738.300	174.601.000				96,8%	96,9%			100.924.400		97.862.700	
													0,0%			-		-	
Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel		48.500.000	139.606.000				46.828.300	135.096.000				96,6%	96,8%			91.106.000		88.267.700	
Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol		10.250.000					9.650.000					94,1%	0,0%			-	10.250.000	-	9.650.000
Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			33.068.400					32.605.000				0,0%	98,6%			33.068.400		32.605.000	
Pendidikan Politik Masyarakat		10.250.000					10.055.000					98,1%	0,0%			-	10.250.000	-	10.055.000
Pemberdayaan Ormas		10.250.000	7.500.000				10.205.000	6.900.000				99,6%	92,0%			-	2.750.000	-	3.305.000
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA		120.750.000	2.000.000				120.569.600	2.000.000				99,9%	100,0%			-	118.750.000	-	118.569.600
Gerakan Bela Negara		120.750.000	2.000.000				120.569.600	2.000.000				99,9%	100,0%			-	118.750.000	-	118.569.600
PROGRAM KETAHANAN EKONOMI DAERAH		87.500.000	310.000.000				86.058.200	128.216.300				98,4%	41,4%			222.500.000		42.158.100	
Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah		80.000.000	310.000.000				78.558.200	128.216.300				98,2%	41,4%			230.000.000		49.658.100	
Dialog Publik Peningkatan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi Kab/Kota		7.500.000					7.500.000					100,0%	0,0%			-	7.500.000	-	7.500.000
PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		73.000.000	10.000.000				71.378.300	7.420.000				97,8%	74,2%			-	63.000.000	-	63.958.300
Pemantauan dan pengendalian Trantibmas												0,0%	0,0%			-		-	
Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa		33.000.000	10.000.000				31.613.500	7.420.000				95,8%	74,2%			-	23.000.000	-	24.193.500
Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM		40.000.000					39.764.800					99,4%	0,0%			-	40.000.000	-	39.764.800
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		2.766.750.000	1.483.900.000				2.747.972.300	1.423.978.200				99,3%	96,0%			-	1.282.850.000	-	1.323.994.100
Pemetaan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Wilayah Sulsel		120.000.000	152.200.000				116.417.400	134.260.000				97,0%	88,2%			32.200.000		17.842.600	
Koordinasi Satgas Kontra Terorisme, Radikalisme dan Narkoba		55.000.000	30.000.000				52.092.000	22.985.000				94,7%	76,6%			-	25.000.000	-	29.107.000
Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing		50.000.000	40.000.000				48.757.500	38.820.000				97,5%	97,1%			-	10.000.000	-	9.937.500

Pembinaan dan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra		67.500.000	15.000.000				58.650.000	14.800.000				86,9%	98,7%			-	52.500.000	-	43.850.000
Pembinaan dan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel		10.250.000	110.200.000				9.500.000	94.759.000				92,7%	86,0%				99.950.000		85.259.000
										0,0%	0,0%			-	-				
Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah		1.714.000.000	848.500.000				1.712.555.400	830.354.200				99,9%	97,9%			-	865.500.000	-	882.201.200
Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa		750.000.000	288.000.000				750.000.000	288.000.000				100,0%	100,0%			-	462.000.000	-	462.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		901.863.000	128.500.000				896.961.700	124.808.500				99,5%	97,1%			-	773.363.000	-	772.153.200
Pembinaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		8.750.000	20.000.000				7.691.100	18.989.000				87,9%	94,9%				11.250.000		11.297.900
Pembinaan dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		864.363.000	22.500.000				862.125.000	22.300.000				99,7%	99,1%			-	841.863.000	-	839.825.000
Pemetaan dan monev Potensi Kerawanan terhadap Kerukunan Umat beragama dan Multi Etnis		13.750.000	20.000.000				12.465.600	18.900.000				90,7%	94,5%				6.250.000		6.434.400
Pemantapan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah		15.000.000	15.000.000				14.680.000	14.920.000				97,9%	99,5%				-		240.000
Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan			51.000.000					49.699.500				0,0%	97,5%				51.000.000		49.699.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.695.073.083	9.276.955.452				7.722.008.721	8.360.064.451				88,8%	90,1%		581.882.369		638.055.730
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				266.517.400	328.621.776				161.951.915	281.710.618				60,8%	85,7%		62.104.376		119.758.703
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				96.352.000	183.509.200				50.088.903	167.248.773				52,0%	91,1%		87.157.200		117.159.870
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				55.198.000	1.358.000				16.056.122	1.358.000				29,1%	100,0%	-	53.840.000	-	14.698.122
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				13.988.400	7.320.000				11.894.482	7.320.000				85,0%	100,0%	-	6.668.400	-	4.574.482
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.800.000	42.939.000				9.272.326	25.550.865				94,6%	59,5%		33.139.000		16.278.539
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				8.840.000	4.200.000				8.546.082	4.200.000				96,7%	100,0%	-	4.640.000	-	4.346.082
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				78.754.500	30.606.176				62.509.500	29.812.980				79,4%	97,4%	-	48.148.324	-	32.696.520
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.584.500	58.689.400				3.584.500	46.220.000				100,0%	78,8%		55.104.900		42.635.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.295.451.381	6.273.305.808				6.107.998.424	5.800.195.683				97,0%	92,5%	-	22.145.573	-	307.802.741
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.051.900.981	6.077.937.956				5.877.095.721	5.610.685.377				97,1%	92,3%		26.036.975	-	266.410.344
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.950.000					54.698.000					99,5%	0,0%	-	54.950.000	-	54.698.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				22.399.400	20.666.500				21.555.018	20.665.640				96,2%	100,0%	-	1.732.900	-	889.378
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.800.000	33.203.000				910.000	30.489.706				50,6%	91,8%		31.403.000		29.579.706

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				44.559.000	2.234.000				34.084.000	2.234.000				76,5%	100,0%	-	42.325.000	-	31.850.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				828.000	828.000				818.433	828.000				98,8%	100,0%	-	-	-	9.567
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				114.950.000	137.544.352				114.863.000	134.400.960				99,9%	97,7%	-	22.594.352	-	19.537.960
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.064.000	892.000				3.974.252	892.000				97,8%	100,0%	-	3.172.000	-	3.082.252
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				33.873.366	7.040.000				26.020.252	6.848.000				76,8%	97,3%	-	26.833.366	-	19.172.252
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.188.000	5.232.000				1.615.236	5.120.000				17,6%	97,9%	-	3.956.000	-	3.504.764
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				24.685.366	1.808.000				24.405.016	1.728.000				98,9%	95,6%	-	22.877.366	-	22.677.016
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				268.607.000	156.240.352				197.569.246	147.498.960				73,6%	94,4%	-	112.366.648	-	50.070.286
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				48.565.000	100.375.000				48.565.000	92.260.000				100,0%	91,9%	-	51.810.000	-	43.695.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				39.570.000	28.474.176				39.280.526	28.200.980				99,3%	99,0%	-	11.095.824	-	11.079.546
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35.472.000	27.391.176				35.203.720	27.037.980				99,2%	98,7%	-	8.080.824	-	8.165.740
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-					-				0,0%	0,0%	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				145.000.000	-				74.520.000	-				51,4%	0,0%	-	145.000.000	-	74.520.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					-					-				0,0%	0,0%	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.067.483.500	1.293.220.276				644.502.940	969.930.517				60,4%	75,0%	-	225.736.776	-	325.427.577
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.610.000	8.440.000				8.570.000	8.400.000				99,5%	99,5%	-	170.000	-	170.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.262.000					46.634.999					98,7%	0,0%	-	47.262.000	-	46.634.999
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				77.800.000	57.629.100				62.060.000	43.264.000				79,8%	75,1%	-	20.170.900	-	18.796.000
Penyediaan Bahan/Material				64.860.000	45.390.000				57.480.000	45.359.000				88,6%	99,9%	-	19.470.000	-	12.121.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu				197.332.500	125.752.800				179.607.500	95.889.500				91,0%	76,3%	-	71.579.700	-	83.718.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				533.818.000	1.018.921.200				187.581.515	740.348.037				35,1%	72,7%	-	485.103.200	-	552.766.522
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.901.000					6.768.926					98,1%	0,0%	-	6.901.000	-	6.768.926
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				130.900.000	37.087.176				95.800.000	36.669.980				73,2%	98,9%	-	93.812.824	-	59.130.020
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.594.900	239.445.000				105.502.900	236.164.000				99,9%	98,6%	-	133.850.100	-	130.661.100
Pengadaan Mebel														0,0%	0,0%	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.594.900	239.445.000				105.502.900	236.164.000				99,9%	98,6%	-	133.850.100	-	130.661.100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.671.536	149.316.240				141.091.936	148.020.774				76,8%	99,1%	-	34.355.296	6.928.838
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.000.000	4.500.000				11.124.400	4.297.318				61,8%	95,5%	-	13.500.000	6.827.082
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.700.000					15.996.000					30,9%	0,0%	-	51.700.000	15.996.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				113.971.536	144.816.240				113.971.536	143.723.456				100,0%	99,2%		30.844.704	29.751.920
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				473.874.000	829.766.000				337.371.108	769.695.899				71,2%	92,8%		355.892.000	432.324.791
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				436.224.000	472.596.000				305.371.108	426.294.661				70,0%	90,2%		36.372.000	120.923.553
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55.110.000					54.150.000				0,0%	98,3%		55.110.000	54.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					102.060.000					99.392.000				0,0%	97,4%		102.060.000	99.392.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000					189.859.238				0,0%	94,9%		200.000.000	189.859.238
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				168.493.630	2.895.430.700				88.268.130	2.863.844.605				52,4%	98,9%		2.726.937.070	2.775.576.475
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				168.493.630	2.895.430.700				88.268.130	2.863.844.605				52,4%	98,9%		2.726.937.070	2.775.576.475
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				92.433.630	38.078.000				39.488.130	37.128.000				42,7%	97,5%	-	54.355.630	2.360.130
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan					216.786.900					202.135.220				0,0%	93,2%		216.786.900	202.135.220
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				76.060.000	2.640.565.800				48.780.000	2.624.581.385				64,1%	99,4%		2.564.505.800	2.575.801.385
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				6.986.849.456	7.431.450.552				6.686.535.917	5.764.649.266				95,7%	77,6%		444.601.096	921.886.651
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				6.986.849.456	7.431.450.552				6.686.535.917	5.764.649.266				95,7%	77,6%		444.601.096	921.886.651

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				19.137.500	9.027.500				18.850.500	9.027.500				98,5%	100,0%	-	10.110.000	-	9.823.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				118.499.500	562.397.200				103.619.445	421.272.411				87,4%	74,9%		443.897.700		317.652.966
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6.729.439.456	6.762.942.052				6.495.242.372	5.257.085.660				96,5%	77,7%		33.502.596	-	1.238.156.712
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				48.307.000	27.068.400				28.287.800	20.914.000				58,6%	77,3%	-	21.238.600	-	7.373.800
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				71.466.000	70.015.400				40.535.800	56.349.695				56,7%	80,5%	-	1.450.600		15.813.895
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				140.728.600	419.070.600				129.899.408	313.603.238				92,3%	74,8%		278.342.000		183.703.830
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				140.728.600	419.070.600				129.899.408	313.603.238				92,3%	74,8%		278.342.000		183.703.830
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				16.343.000	2.350.000				16.343.000	2.350.000				100,0%	100,0%	-	13.993.000	-	13.993.000
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				93.350.300	388.554.900				84.361.478	283.688.978				90,4%	73,0%		295.204.600		199.327.500

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				31.035.300	28.165.700				29.194.930	27.564.260				94,1%	97,9%	-	2.869.600	-	1.630.670
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.505.441.400	709.408.800				1.427.380.821	705.823.590				94,8%	99,5%	-	796.032.600	-	721.557.231
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1.505.441.400	709.408.800				1.427.380.821	705.823.590				94,8%	99,5%	-	796.032.600	-	721.557.231
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				301.001.000	114.498.500				300.977.082	111.746.319				100,0%	97,6%	-	186.502.500	-	189.230.763
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.157.683.000	531.294.500				1.090.641.560	530.795.700				94,2%	99,9%	-	626.388.500	-	559.845.860
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				42.078.400	29.453.400				31.465.712	29.448.471				74,8%	100,0%	-	12.625.000	-	2.017.241
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4.679.000	34.162.400				4.296.467	33.833.100				91,8%	99,0%		29.483.400		29.536.633
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.321.545.100	46.003.703.104				2.067.332.883	45.899.532.512				89,0%	99,8%		43.682.158.004		43.832.199.629
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.321.545.100	46.003.703.104				2.067.332.883	45.899.532.512				89,0%	99,8%		43.682.158.004		43.832.199.629
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				17.000.000	20.000.000					14.100.000				0,0%	70,5%		3.000.000		14.100.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				32.755.000	1.572.000				2.677.373	1.572.000				8,2%	100,0%	-	31.183.000	-	1.105.373

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.464.399.500	44.734.411.804				1.356.333.090	44.666.269.710				92,6%	99,8%	43.270.012.304	43.309.936.620
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				108.056.000	63.960.000				78.129.195	49.559.702				72,3%	77,5%	- 44.096.000	- 28.569.493
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				152.540.000	261.242.800				98.150.329	245.514.600				64,3%	94,0%	108.702.800	147.364.271
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				546.794.600	922.516.500				532.042.896	922.516.500				97,3%	100,0%	375.721.900	390.473.604

2.4. Kelompok sasaran layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanannya menasar ke kelompok sasaran masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.5. Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai Indikator yang telah di targetkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat bergantung dengan kinerja para mitranya antara lain :

1. Polda Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Kodam XIV Hasanuddin,
3. Pangkoop AU,
4. Anggota Forkopimda,
5. BINDA,
6. BNNP,
7. BPS,
8. Kanwil Hukum dan Ham,
9. FKUB,
10. FPK,
11. DII.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi selatan tidak lepas dari permasalahan baik dari internal maupun external yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas sehingga potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi selatan.

Permasalahan dalam Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

1. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah
2. Masih ada nya penggunaan cara- cara penyampaian pendapat yang mengabaikan / melecehkan symbol-symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum
3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan
4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat

Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri

1. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan
2. Belum optimalnya organisasi parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat

Permasalahan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitasharga komoditas pangan
2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin

Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBUDHUKAM

2. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Sehubungan telah ditetapkan RPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD maka dengan demikian ditetapkan pula tujuan RPD dimana Program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan melekat di Tujuan “Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel” dengan “Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”. Hal ini terjadi karena apabila Sulawesi Selatan Aman Damai dan Demokratis maka kinerja pemerintah juga akan meningkat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi selatan

- a. Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, juga dalam proses penyusunan, akan tetapi diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap mengacu pada Program Prioritas sesuai surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum no. 910/964/Polpum tanggal 8 februari 2022, tentang dukungan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah antara lain:
 1. Kerukunan Umat Beragama di Daerah;
 2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
 3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah;
 4. Penghayatan dan Pengalaman Nilai Pancasila;
 5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dibidang Kewaspadaan dini dan deteksi dini;
 6. Tim terpadu penanganan konflik social (PKS) daerah yang efektif;
 7. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;
 8. Pendidikan politik masyarakat di Daerah;
 9. Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus partai politik;
 10. Fasilitasi penguatan demokrasi di Dearah;
 11. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 12. Pembinaan dan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 13. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap

Narkotika dan precursor Narkotika (P4GN dan PN);

14. Peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di Wilayah kerja masing-masing;
 15. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
- b. Sasaran Renstra Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
 2. Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa
 3. Meningkatnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat
 4. Tertanamkannya nilai – nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan partai politik
 5. Membangun system dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik daerah
 6. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat
 7. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis

Dari sasaran kementerian dan rangkuman sasaran kabupaten / kota diatas terdapat sejumlah kesamaan sesuai dengan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik diantaranya terciptanya kesatuan bangsa di masyarakat baik dari segi politik, beragama dan bermasyarakat sehingga menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram di masyarakat. Hal

inilah yang merupakan tujuan kita bersama bahkan bukan hanya untuk badan kesatuan bangsa dan politik saja akan tetapi merupakan tujuan dari berbagai aspek dan sendi kehidupan di negeri ini.

3.4. Penentuan Isu – Isu strategis

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri, sasaran jangka menengah Renstra Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan dan sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah di dapat sejumlah isu – isu penting dan merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk jangka lima tahun ke depan diantaranya adalah tergambar dalam table 3.2 berikut

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAAN DAN KARAKTER BANGSA	1. Menguatnya sikapprimordialis me dalam penyelenggara n pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisianjabatan –jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah 2. Masih ada nya penggunaan cara–cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan symbol–symbol Negara, bahkan ada yang cenderung	Kualitas Keamanan, Perdamaian dan demokrasi harus selalu berada di zona hijau		Sulsel aman, damai dan demokratis

		anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum 3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan 4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat			
2	Permasalahan dalam Bidang POLITIK DALAM NEGERI	1. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan 2. Belum optimalnya organisasi parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat			
3	Permasalahan dalam Bidang KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,	1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitas harga komoditas			

	AGAMA, DAN ORGANISASI	pangan 2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitasharga komoditas pangan 3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin			
4	Permasalahan dalam Bidang KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBU DHUKAM 2. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi			

Bab IV
TUJUAN, DAN SASARAN,

Untuk menjawab atau mengantisipasi isu-isu strategis yang telah di rencanakan di bab sebelumnya yaitu Sulawesi Selatan Aman Damai dan Demokratis, Maka dirumuskan sebagai berikut:

41. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun yaitu :

1. Mewujudkan Sulawesi Selatan aman, damai dan demokratis.

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan hasil yang diharapkan yaitu sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Untuk lebih memahami tentang sasaran dan kaitannya dengan tujuan bisa dilihat di Tabel T-C.25 dibawah ini:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mewujudkan Sulawesi Selatan aman, damai dan demokratis		Persentase Potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani	100%	100%	100%
		Meningkatkan deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan,	Jumlah Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terdeteksi	15	20	25

		Hambatan dan Gangguan				
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila, Politik dan Karakterbangsa	Persentase peserta yang hadir pada Pendidikan idiologi Pancasila, politik dan karakterbangsa	75	80	85
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75	78	80

Sesuai Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD terdapat pertama target indikator tujuan Persentase Potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani ditetapkan berdasarkan harapan bakesbangpol prov. Sulsel ingin menyelesaikan semua potensi ATHG sebab jika ada ATHG yang tidak terselesaikan akan sangat mengganggu seluruh aktifitas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan perhitungan jumlah yang ditangani dibagi dengan jumlah konflik yang terdeteksi dikali 100% (Seratus persen), bahkan bisa saja mengganggu stabilitas keamanan Indonesia secara umum. Kedua target indikator sasaran Jumlah Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terdeteksi ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya walaupun metodologi tidak sama dengan perhitungan mendeteksi langsung di lapangan, indikator sasaran Persentase peserta yang hadir pada Pendidikan idiologi Pancasila, politik dan karakterbangsa ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya walaupun metodologi tidak sama dengan perhitungan jumlah yang hadir dibagi dengan jumlah yang direncanakan dikali 100% (serratus persen), indikator sasaran Nilai SAKIP OPD ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya walaupun metodologi tidak sama dengan perhitungan hasil LHE Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Agar dapat lebih memahami tentang kinerja yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Renstra 2024 -2026 dapat melihat table dibawah ini :

Cascading Kinerja Perangkat Daerah

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Outcome	Indikator Outcome	Kinerja Output	Indikator Output
1	Mewujudkan Sulawesi Selatan aman damai dan demokratis		Persentase potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan yang tertangani				
		Meningkatkan Deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan	jumlah potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan yang terdeteksi				
				Meningkatkan Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda		
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi Dengan Forkopimda	Jumlah Koordinasi dan sinergi Dengan Forkopimda
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di	Jumlah Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di

						bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
				Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait dan Organisasi Pemerintah Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait dan Organisasi Pemerintah Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan Pemerintah Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan Pemerintah Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Orkemas Organisasi	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Orkemas		

				Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas			
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Instansi terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
						Meningkatkan Koordinasi dan sinergi dengan Masyarakat dan Okemas	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Okemas
2		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Idiologi Pancasila, Politik dan Karakterbangsa	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila, Politik dan Karakterbangsa				
				Meningkatkan Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa kepada masyarakat	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa		
						Meningkatkan Pendidikan Idiologi Pancasila kepada masyarakat	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila
						Meningkatkan Pendidikan Karakter bangsa kepada masyarakat	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Karakter bangsa
				Meningkatkan Pendidikan Politik kepada masyarakat	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat		

						Meningkatkan Pendidikan Politik kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Politik kepada masyarakat
3.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD				
				Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah		
					Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		
					Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Terkelolanya Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat

							Daerah
						Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Terwujudnya Administrasi Umum Guna Mendukung Kelancaran	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum
						Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi
						Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Secara Berkelanjutan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

a. Strategi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan sejumlah strategi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini dalam menghadapi Potensi Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
- b. Meningkatkan Peserta yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas.

b. Kebijakan

Dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Komunikasi dan pemantauan baik langsung maupun tidak langsung dengan stakeholder maupun instansi terkait lainnya.
- b. Peningkatan SDM aparat dan Sosialisasi kepada Masyarakat.
- c. Peningkatan peserta yang hadir pada pendidikan Idiologi Pancasila.
- d. Peningkatan peserta yang hadir pada pendidikan Politik.
- e. Peningkatan peserta yang hadir pada pendidikan Karakter Bangsa.
- f. Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur.
- g. Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah.
- h. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.

Tabel T-C.26.

RANCANGAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan (RPD) : Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			
Sasaran (RPD) : Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sulawesi Selatan aman, damai dan demokratis	Meningkatkan deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini dalam menghadapi Potensi Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan	Penigkatan Komunikasi dan pemantauan baik langsung maupun tidak langsung dengan stakeholder maupun instansi terkait lainnya
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila, Politik dan Karakterbangsa	Meningkatkan Peserta yang Hadir Pada Pendidkan Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa	Peningkatan SDM aparat dan Sosialisasi kepada Masyarakat
			Peningkatan peserta yang hadir pada pendidikan Idiologi pancasila
			Peningkatan peserta yang hadir pada pendidikan Politik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur
			Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah
			Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan yang semula merumuskan dan menetapkan 10 program, setelah adanya permendagri 90 hanya melaksanakan 6 program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
3. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
6. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Dari setiap program di atas juga telah dijabarkan dalam sejumlah kegiatan dengan total 13 kegiatan dan 93 Sub kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

FINAL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	99,92	100,42	10.213.991.947,00	100.92	10.924.334.349,00	101.43.00	11.120.235.349,00	101.43.00	32.258.561.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	75.42.00	82.96	0,00	87.11	0,00	91.47	0,00	91.47	0,00		
				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	76.29	79.32	0,00	83.18	0,00	87.05	0,00	87.05	0,00		
		8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24 Dokumen	222.920.000,00	24 Dokumen	238.076.000,00	24 Dokumen	241.882.000,00	24 Dokumen	702.878.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	165.731.000,00	2 Dokumen	177.000.000,00	2 Dokumen	179.832.000,00	2 Dokumen	522.563.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
		8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.369.000,00	1 Dokumen	1.462.000,00	1 Dokumen	1.485.000,00	1 Dokumen	4.316.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
		8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.901.000,00	1 Dokumen	10.574.000,00	1 Dokumen	10.743.000,00	1 Dokumen	31.218.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
		8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.901.000,00	1 Dokumen	6.302.000,00	1 Dokumen	6.402.000,00	1 Dokumen	18.605.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
		8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.095.000,00	1 Dokumen	4.373.000,00	1 Dokumen	4.442.000,00	1 Dokumen	12.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
		8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	13 Laporan	5.000.000,00	13 Laporan	5.340.000,00	13 Laporan	5.425.000,00	13 Laporan	15.765.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5 Laporan	30.923.000,00	5 Laporan	33.025.000,00	5 Laporan	33.553.000,00	5 Laporan	97.501.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN		

8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	85 Laporan	6.540.955.947,00	87 Laporan	7.001.541.349,00	89 Laporan	7.134.694.349,00	89 Laporan	20.677.191.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	50 Orang/ Bulan	6.373.881.947,00	52 Orang/ Bulan	6.823.109.349,00	54 Orang/ Bulan	6.953.410.349,00	54 Orang/ Bulan	20.150.401.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	6 Dokumen	30.027.000,00	6 Dokumen	32.068.000,00	6 Dokumen	32.581.000,00	6 Dokumen	94.676.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 Dokumen	10.931.000,00	12 Dokumen	11.674.000,00	12 Dokumen	11.860.000,00	12 Dokumen	34.465.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	3.843.000,00	2 Laporan	4.104.000,00	2 Laporan	4.169.000,00	2 Laporan	12.116.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	1.996.000,00	1 Dokumen	2.131.000,00	1 Dokumen	2.165.000,00	1 Dokumen	6.292.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	109.641.000,00	12 Laporan	117.096.000,00	12 Laporan	118.969.000,00	12 Laporan	345.706.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen	10.636.000,00	1 Dokumen	11.359.000,00	1 Dokumen	11.540.000,00	1 Dokumen	33.535.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola Oleh Perangkat Daerah	-	4 Barang	52.348.000,00	4 Barang	55.907.000,00	4 Barang	56.800.000,00	4 Barang	165.055.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	31.170.000,00	1 Dokumen	33.289.000,00	1 Dokumen	33.821.000,00	1 Dokumen	98.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	20.178.000,00	1 Laporan	21.550.000,00	1 Laporan	21.894.000,00	1 Laporan	63.622.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.068.000,00	2 Laporan	1.085.000,00	2 Laporan	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	195 Laporan	169.412.000,00	195 Laporan	180.931.000,00	195 Laporan	183.823.000,00	195 Laporan	534.166.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.068.000,00	1 Unit	1.085.000,00	1 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	58 Paket	87.050.000,00	58 Paket	92.969.000,00	58 Paket	94.456.000,00	58 Paket	274.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	26.668.000,00	12 Dokumen	28.481.000,00	12 Dokumen	28.936.000,00	12 Dokumen	84.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	1.694.000,00	12 Dokumen	1.809.000,00	12 Dokumen	1.837.000,00	12 Dokumen	5.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0006	Pegawai Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	1 Orang	1.000.000,00	1 Orang	1.068.000,00	1 Orang	1.085.000,00	1 Orang	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Orang	50.000.000,00	1 Orang	53.400.000,00	1 Orang	54.254.000,00	1 Orang	157.654.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	100 Orang	1.000.000,00	100 Orang	1.068.000,00	100 Orang	1.085.000,00	100 Orang	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	10 Orang	1.000.000,00	10 Orang	1.068.000,00	10 Orang	1.085.000,00	10 Orang	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06	Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket	-	26 Paket	939.237.000,00	26 Paket	1.003.102.000,00	26 Paket	1.019.148.000,00	26 Paket	2.961.487.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		jumlah dokumen	-	43 Dokumen	0,00	43 Dokumen	0,00	43 Dokumen	0,00	43 Dokumen	0,00		
		Jumlah Laporan	-	41 Laporan	0,00	41 Laporan	0,00	41 Laporan	0,00	41 Laporan	0,00		
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	41.124.000,00	1 Paket	43.920.000,00	1 Paket	44.622.000,00	1 Paket	129.666.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	1.000.000,00	3 Paket	1.068.000,00	3 Paket	1.085.000,00	3 Paket	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10 Paket	1.000.000,00	10 Paket	1.068.000,00	10 Paket	1.085.000,00	10 Paket	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	125.390.000,00	2 Paket	133.916.000,00	2 Paket	136.058.000,00	2 Paket	395.364.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4 Dokumen	1.000.000,00	4 Dokumen	1.068.000,00	4 Dokumen	1.085.000,00	4 Dokumen	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	10 Paket	19.801.000,00	10 Paket	21.147.000,00	10 Paket	21.485.000,00	10 Paket	62.433.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	230.833.000,00	1 Laporan	246.529.000,00	1 Laporan	250.473.000,00	1 Laporan	727.835.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	40 Laporan	516.346.000,00	40 Laporan	551.457.000,00	40 Laporan	560.280.000,00	40 Laporan	1.628.083.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.743.000,00	12 Dokumen	2.929.000,00	12 Dokumen	2.975.000,00	12 Dokumen	8.647.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	-	42 Unit	357.556.000,00	42 Unit	381.869.000,00	42 Unit	387.977.000,00	42 Unit	1.127.402.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Jumlah Paket	-	10 Paket	0,00	10 Paket	0,00	10 Paket	0,00	10 Paket	0,00		
8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.068.000,00	1 Unit	1.085.000,00	1 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Paket	179.228.000,00	10 Paket	191.415.000,00	10 Paket	194.477.000,00	10 Paket	565.120.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	30 Unit	174.328.000,00	30 Unit	186.182.000,00	30 Unit	189.160.000,00	30 Unit	549.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.068.000,00	1 Unit	1.085.000,00	1 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	1.000.000,00	5 Unit	1.068.000,00	5 Unit	1.085.000,00	5 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	1.000.000,00	5 Unit	1.068.000,00	5 Unit	1.085.000,00	5 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	224 Laporan	1.120.195.000,00	224 Laporan	1.196.368.000,00	224 Laporan	1.215.509.000,00	224 Laporan	3.532.072.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	200 Laporan	1.000.000,00	200 Laporan	1.068.000,00	200 Laporan	1.085.000,00	200 Laporan	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	1.000.000,00	12 Laporan	1.068.000,00	12 Laporan	1.085.000,00	12 Laporan	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	1.118.195.000,00	12 Laporan	1.194.232.000,00	12 Laporan	1.213.339.000,00	12 Laporan	3.525.766.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	69 Unit	811.368.000,00	69 Unit	866.540.000,00	69 Unit	880.402.000,00	69 Unit	2.558.310.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Paiknva	-	26 Unit	598.545.000,00	26 Unit	639.246.000,00	26 Unit	649.473.000,00	26 Unit	1.887.264.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

Menngkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	20 Unit	8.323.000,00	20 Unit	8.888.000,00	20 Unit	9.030.000,00	20 Unit	26.241.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit	55.000.000,00	20 Unit	58.740.000,00	20 Unit	59.679.000,00	20 Unit	173.419.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.068.000,00	1 Unit	1.085.000,00	1 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	147.500.000,00	1 Unit	157.530.000,00	1 Unit	160.050.000,00	1 Unit	465.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.068.000,00	1 Unit	1.085.000,00	1 Unit	3.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	20 %	80 %	7.534.680.000,00	80 %	8.047.036.000,00	80 %	8.175.787.000,00	80 %	23.757.503.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan ideologi pancasila	-	80 %	7.534.680.000,00	80 %	8.047.036.000,00	80 %	8.175.787.000,00	80 %	23.757.503.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan karakter bangsa	-	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00		
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	12 Dokumen	201.970.000,00	12 Dokumen	215.703.000,00	12 Dokumen	219.154.000,00	12 Dokumen	636.827.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	5.732.710.000,00	2 Dokumen	6.119.533.000,00	2 Dokumen	6.148.125.000,00	2 Dokumen	18.000.368.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Politik	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	12 Laporan	1.500.000.000,00	13 Laporan	1.600.000.000,00	14 Laporan	1.700.000.000,00	14 Laporan	4.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	-	80 %	590.937.944.000,00	85 %	7.922.757.000,00	90 %	8.049.520.000,00	90 %	606.910.221.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan Politik kepada masyarakat	-	75 %	590.937.944.000,00	80 %	7.922.757.000,00	85 %	8.049.520.000,00	85 %	606.910.221.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	-	2 Dokumen	5.507.000,00	2 Dokumen	5.881.000,00	2 Dokumen	5.975.000,00	2 Dokumen	17.363.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang	-	2 Dokumen	104.168.000,00	3 Dokumen	111.251.000,00	3 Dokumen	113.031.000,00	3 Dokumen	328.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	-	100 Orang	590.738.912.000,00	100 Orang	7.710.193.000,00	100 Orang	7.833.556.000,00	100 Orang	606.282.661.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	-	6 Orang	28.329.000,00	6 Orang	30.255.000,00	6 Orang	30.739.000,00	6 Orang	89.323.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	-	3 Laporan	61.028.000,00	3 Laporan	65.177.000,00	4 Laporan	66.219.000,00	4 Laporan	192.424.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	-	100 %	106.373.000,00	100 %	113.604.000,00	100 %	115.419.000,00	100 %	335.396.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi	-	50 Kali	106.373.000,00	50 Kali	113.604.000,00	50 Kali	115.419.000,00	50 Kali	335.396.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Organisasi	-	50 Kali	0,00	50 Kali	0,00	50 Kali	0,00	50 Kali	0,00		
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	4 Dokumen	32.445.000,00	4 Dokumen	34.651.000,00	4 Dokumen	35.205.000,00	4 Dokumen	102.301.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	100 Orang	30.525.000,00	100 Orang	32.600.000,00	100 Orang	33.121.000,00	100 Orang	96.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	100 Orang	23.567.000,00	100 Orang	25.169.000,00	100 Orang	25.571.000,00	100 Orang	74.307.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	1 Laporan	19.836.000,00	1 Laporan	21.184.000,00	1 Laporan	21.522.000,00	1 Laporan	62.542.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan	-	100 %	1.378.277.000,00	100 %	1.471.998.000,00	100 %	1.495.548.000,00	100 %	4.345.823.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	-	2 Kali	1.378.277.000,00	2 Kali	1.471.998.000,00	2 Kali	1.495.548.000,00	2 Kali	4.345.823.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan	-	2 Kali	0,00	2 Kali	0,00	2 Kali	0,00	2 Kali	0,00		
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	-	3 Dokumen	58.044.000,00	3 Dokumen	61.990.000,00	3 Dokumen	62.981.000,00	3 Dokumen	183.015.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	100 Orang	1.236.091.000,00	100 Orang	1.320.145.000,00	100 Orang	1.341.267.000,00	100 Orang	3.897.503.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	100 Orang	47.134.000,00	100 Orang	50.339.000,00	100 Orang	51.144.000,00	100 Orang	148.617.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	3 Laporan	37.008.000,00	3 Laporan	39.524.000,00	3 Laporan	40.156.000,00	3 Laporan	116.688.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentuk Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik	-	100 %	128.145.208.000,00	100 %	32.701.453.000,00	100 %	33.224.673.000,00	100 %	194.071.334.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kordinasi dan sinergi dengan forkopimda	-	12 Kali	128.145.208.000,00	12 Kali	32.701.453.000,00	12 Kali	33.224.673.000,00	12 Kali	194.071.334.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan tim bentuk pemerintah di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	-	6 Kali	0,00	6 Kali	0,00	6 Kali	0,00	6 Kali	0,00		
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	-	6 Dokumen	124.662.167.000,00	6 Dokumen	28.973.287.000,00	6 Dokumen	29.436.859.000,00	6 Dokumen	183.072.313.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	-	2 Dokumen	1.052.975.000,00	2 Dokumen	1.124.578.000,00	2 Dokumen	1.142.571.000,00	2 Dokumen	3.320.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN

8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	-	30 Orang	496.330.000,00	30 Orang	538.359.000,00	30 Orang	546.972.000,00	30 Orang	1.581.661.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	12 Laporan	397.054.000,00	12 Laporan	424.053.000,00	12 Laporan	430.837.000,00	12 Laporan	1.251.944.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	1 Dokumen	1.536.682.000,00	1 Dokumen	1.641.176.000,00	1 Dokumen	1.667.434.000,00	1 Dokumen	4.845.292.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SULAWESI SELATAN
					738.316.473.947,00		61.181.182.349,00		62.181.182.349,00		861.678.838.645,00		


KEPALA BADAN

Drs. Muhammad Firda, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19631231 198803 1 132

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Secara tidak langsung indikator ini juga merupakan target yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan selama Tiga tahun kedepan, dan indikator itu adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Persentase Potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani		100 %	100 %	100 %	100%
2	Jumlah Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terdeteksi		15	20	25	60
3	Persentase peserta yang hadir pada Pendidikan idiologi Pancasila, politik dan karakterbangsa		75	80	85	85%
4	Nilai SAKIP OPD		75	78	80	80

Bab VIII

PENUTUP

Renstra yang disusun ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi panduan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (Tiga) tahun ke depan yang didasarkan pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 dalam mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan sehingga perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2024-2026 dengan sebaik- baiknya.
2. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bakesbangpol, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.
3. Indikator Renstra Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja Tiga tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan dan sasaran rencana pembangunan RPD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023 sesuai dengan tupoksi Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh aparaturnya Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2026 serta dalam pelaksanaannya sangat perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Makassar,

KEPALA BADAN KESBANGPOL



[Handwritten signature in blue ink]
Drs. MUHAMMAD FIRDA.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19631231 198803 1 132